

PENERAPAN SISTEM MONITORING KEASISTENAN PENCEGAHAN SEBAGAI FUNGSI PENGAWASAN DI OMBUDSMAN RI JAWA TIMUR

Vany Hidayah Setyawati¹, Supri Hartono M.S²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

vanihasa20@gmail.com, suprihartono@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Sekolah Kedinasan (SIPENCANTAR) di Kantor Regional II BKN Sidoarjo menjadi bagian penting dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memahami dan mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan eksternal Ombudsman RI dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas seleksi ASN. Metode kegiatan dilakukan melalui observasi langsung di lokasi ujian, wawancara dengan pihak pelaksana, dan pendampingan oleh Keasistenan Pencegahan Ombudsman Jatim. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan catatan lapangan, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menilai efektivitas pelaksanaan pengawasan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengawasan berjalan dengan tertib dan profesional, serta keasistenan berperan aktif dalam memantau potensi maladministrasi. Kolaborasi antara Ombudsman, BKN, dan peserta magang turut memperkuat implementasi nilai transparansi dan pelayanan publik yang berintegritas. Kesimpulannya, fungsi pengawasan Ombudsman terbukti efektif dalam mendorong penyelenggaraan seleksi yang bersih, serta disarankan agar kegiatan magang semacam ini terus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memperluas pemahaman publik tentang pentingnya pengawasan pelayanan.

Kata kunci: Ombudsman, pengawasan publik, SKD SIPENCANTAR, Keasistenan Pencegahan

ABSTRACT

The supervision activity of the Ombudsman of the Republic of Indonesia, East Java Representative, during the Basic Competency Selection (SKD) of the State Civil Apparatus School Admission (SIPENCANTAR) at BKN Regional Office II Sidoarjo plays an important role in improving the quality of public service. The purpose of this community service is to understand and support the external supervision function of the Ombudsman in ensuring transparency and accountability in the civil servant selection process. The method involved direct field observation, interviews with organizers, and mentoring from the Preventive Assistant Divisions of the East Java Ombudsman. Data were collected through documentation and field notes, then analyzed descriptively to assess the effectiveness of the supervision process. The results showed that supervision was carried out properly and professionally, with the assistant divisions playing an active role in monitoring potential maladministration. Collaboration among the Ombudsman, BKN, and interns strengthened the implementation of transparency and integrity values in public service. In conclusion, the Ombudsman's supervision function effectively ensures a fair and transparent selection process, and such internship activities are recommended to be continued as a means to promote public awareness of supervision in public service.

Keywords: Ombudsman, public supervision, SKD SIPENCANTAR, Preventive Divisi

PENDAHULUAN

Secara global, tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel merupakan salah satu indikator utama terwujudnya *good governance* di berbagai negara. Lembaga pengawas eksternal dibentuk untuk memastikan agar pelayanan publik berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks tersebut, sistem rekrutmen aparatur negara yang transparan dan bebas intervensi menjadi fondasi penting bagi terciptanya birokrasi yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat (Yusri, 2020).

Pada tingkat nasional, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang memberikan mandat kepada Ombudsman sebagai lembaga negara independen yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan public (Sinen, 2021). Salah satu bentuk konkret dari pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut adalah kegiatan pemantauan proses Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bagi calon taruna Sekolah Kedinasan (SIPENCANTAR) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kegiatan ini merupakan bagian dari rekrutmen calon aparatur sipil negara (ASN) yang wajib menjunjung tinggi asas transparansi, akuntabilitas, non-diskriminasi, serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Pada tataran lokal, pelaksanaan SKD SIPENCANTAR di BKN Kantor Regional II Sidoarjo menjadi fokus pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur (ORI Jatim). Hal ini dilatarbelakangi oleh tingginya minat masyarakat terhadap seleksi sekolah kedinasan yang sering kali berpotensi menimbulkan maladministrasi, seperti kurangnya keterbukaan informasi, adanya pihak tidak bertanggung jawab yang menjanjikan kelulusan, maupun praktik pungutan liar. Oleh karena itu, kehadiran tim pengawasan Ombudsman RI Jatim di lokasi ujian bertujuan untuk memastikan seluruh proses pelaksanaan seleksi berjalan sesuai dengan ketentuan, menjaga kepercayaan publik, serta memberikan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan kendala di lapangan (Tantri et al., 2024).

Selain sebagai bentuk implementasi fungsi pengawasan, kegiatan ini juga menjadi upaya edukatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi publik dalam menjaga integritas pelayanan negara. Dalam pelaksanaannya, keasistenan Riksa (Pemeriksaan Laporan) dan PVL (Penerimaan dan Verifikasi Laporan) berperan penting dalam memastikan setiap temuan atau laporan di lapangan tertangani dengan cepat, sistematis, dan sesuai standar pengawasan.

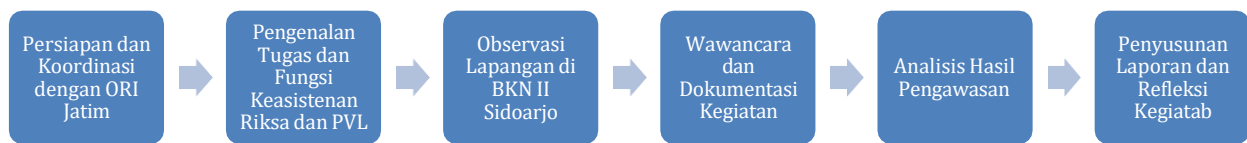
Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan magang sekaligus pengabdian ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan fungsi pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur terhadap proses seleksi SKD SIPENCANTAR di BKN II Sidoarjo, menganalisis

peran keasistenan Riksa dan PVL dalam mendukung efektivitas pengawasan pelayanan publik, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dan peserta seleksi mengenai pentingnya pelaporan apabila ditemukan indikasi maladministrasi dalam pelayanan publik.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif-deskriptif, di mana peserta magang terlibat langsung dalam proses pengawasan pelayanan publik bersama tim Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur (ORI Jatim). Kegiatan dilaksanakan di Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara (BKN) Sidoarjo selama pelaksanaan **Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Sekolah Kedinasan (SIPENCANTAR)** Tahun 2025, yakni pada bulan Agustus 2025. Lokasi ini dipilih karena merupakan pusat pelaksanaan ujian berbasis *Computer Assisted Test (CAT)* untuk wilayah Jawa Timur yang melibatkan ribuan peserta dari berbagai daerah. Khalayak sasaran kegiatan meliputi panitia pelaksana, peserta seleksi, serta masyarakat yang hadir sebagai pengamat jalannya proses seleksi.

Populasi dalam kegiatan ini adalah seluruh peserta dan panitia pelaksanaan SKD SIPENCANTAR di BKN II Sidoarjo, sedangkan sampel yang diamati secara langsung adalah sejumlah peserta ujian dan petugas penyelenggara pada beberapa sesi pelaksanaan. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, dengan memilih informan atau kegiatan yang relevan dengan fungsi pengawasan Ombudsman. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur dengan petugas Ombudsman dari Keasistenan Pencegahan, serta dokumentasi berupa laporan kegiatan, foto, dan lembar pemantauan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk menggambarkan peran Ombudsman RI Jatim dalam memastikan jalannya seleksi berlangsung transparan, akuntabel, dan bebas maladministrasi. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif dan visualisasi bagan alir kegiatan yang menggambarkan tahapan pelaksanaan pengawasan di lapangan.



Gambar 1. Bagan Alir Tahapan Kegiatan Pengabdian/Magang

HASIL dan PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan magang dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur (ORI Jatim) yang berfokus pada pengawasan jalannya Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Sekolah Kedinasan (SIPENCANTAR) di BKN Kantor Regional II Sidoarjo menunjukkan karakteristik mitra yang memiliki tingkat profesionalisme tinggi dalam menjalankan fungsi pengawasan pelayanan publik. Subjek pengabdian dalam kegiatan ini terdiri dari kepala bidang pencegahan dan keasistenan, panitia pelaksana dari BKN, serta peserta seleksi. Selama kegiatan berlangsung, para asisten Ombudsman menunjukkan kinerja yang sistematis dalam mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan seleksi, mulai dari proses registrasi peserta, pemeriksaan identitas, pelaksanaan ujian berbasis *Computer Assisted Test (CAT)*, hingga pengawasan terhadap potensi pelanggaran prosedur di area ujian.

Dari hasil observasi di lapangan, peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Sekolah Kedinasan di Kantor Regional II BKN Sidoarjo dilakukan oleh Keasistenan Pencegahan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur. Kegiatan pengawasan ini bertujuan memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari maladministrasi. Tim Keasistenan Pencegahan melakukan pemantauan langsung di area registrasi peserta, ruang tunggu, serta ruang ujian berbasis *Computer Assisted Test (CAT)* untuk meninjau kepatuhan terhadap prosedur standar yang telah ditetapkan. Selain itu, tim juga melakukan komunikasi aktif dengan panitia pelaksana dan peserta seleksi untuk mengidentifikasi potensi kendala lapangan serta memberikan rekomendasi preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran prosedural. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan pencegahan yang dilakukan Ombudsman Jatim memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses seleksi yang adil, tertib, dan sesuai dengan asas pelayanan publik yang baik. Pelaksanaan pengawasan Ombudsman di lokasi seleksi berjalan dengan dukungan koordinasi yang kuat antara petugas BKN, panitia pusat, dan pihak keamanan setempat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kehadiran Ombudsman memberikan efek preventif yang signifikan terhadap potensi pelanggaran atau praktik maladministrasi. Para peserta seleksi merasa lebih aman dan percaya terhadap objektivitas proses seleksi karena adanya pemantauan dari lembaga independen negara. Selain itu, masyarakat yang hadir di sekitar lokasi juga memperoleh pemahaman baru

mengenai peran Ombudsman dalam menjamin keadilan dan transparansi dalam pelayanan publik. Dalam konteks teoritis, hasil ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam sistem birokrasi publik. Menurut (Daulay, 2022), keberadaan lembaga pengawas eksternal seperti Ombudsman mampu memperkuat sistem pelayanan publik dengan mengurangi praktik-praktik penyimpangan administratif. Hal ini diperkuat pula oleh penelitian yang dilakukan oleh (Sari et al., 2022), yang menyebutkan bahwa pengawasan aktif Ombudsman terhadap rekrutmen ASN mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan ORI Jatim di BKN II Sidoarjo tidak hanya memberikan dampak langsung terhadap kelancaran pelaksanaan seleksi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan budaya transparansi dalam sistem pemerintahan daerah.

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang menjadi bahan evaluasi. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah personel Ombudsman yang bertugas di lapangan dibandingkan dengan jumlah peserta ujian yang sangat besar. Selain itu, intensitas pengawasan perlu diperkuat terutama pada aspek sosialisasi kepada masyarakat agar fungsi dan peran Ombudsman semakin dikenal luas. Meskipun demikian, Keasistenan Pencegahan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur telah menunjukkan kinerja yang optimal dengan melakukan pembagian tugas secara proporsional antara pemantauan lapangan dan pengumpulan data preventif. Pendekatan ini mencerminkan efektivitas strategi pencegahan maladministrasi yang dijalankan melalui koordinasi, komunikasi, serta supervisi yang berkesinambungan terhadap pelaksanaan kegiatan seleksi.

Secara keseluruhan, kegiatan magang ini memberikan gambaran nyata mengenai implementasi fungsi pengawasan Ombudsman dalam konteks pelayanan publik strategis. Pelaksanaan pengawasan di BKN II Sidoarjo tidak hanya menegaskan komitmen Ombudsman RI Jatim terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih dan akuntabel, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran langsung bagi peserta magang untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip pengawasan administratif dijalankan secara profesional dan terukur di lapangan.



Gambar 2. Tim Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur melakukan pengawasan langsung pada pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Sekolah Kedinasan di Kantor Regional II BKN Sidoarjo

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur pada pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Sekolah Kedinasan (SIPENCANTAR) di Kantor Regional II BKN Sidoarjo menunjukkan bahwa fungsi pengawasan eksternal terhadap penyelenggaraan pelayanan publik berjalan dengan baik dan profesional. Melalui keterlibatan Ombudsman Keasistenan Pencegahan, pengawasan tidak hanya difokuskan pada aspek prosedural, tetapi juga pada kepatuhan terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan bagi seluruh peserta seleksi. Kinerja keasistenan yang sinergis dengan pihak pelaksana kegiatan turut memastikan bahwa setiap potensi maladministrasi dapat dicegah sedini mungkin. Kegiatan magang ini memberikan pengalaman nyata bagi peserta dalam memahami penerapan fungsi pengawasan publik di lapangan serta pentingnya koordinasi antarlembaga untuk menjamin kualitas pelayanan publik. Berdasarkan hasil tersebut, disarankan agar kegiatan pengawasan Ombudsman terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas SDM asisten dan pelibatan mahasiswa dalam kegiatan magang serupa sebagai bentuk edukasi publik dan pengembangan kompetensi calon pengawas pelayanan publik di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Daulay, A. S. M. (2022). Efektivitas Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara di Dinas Sosial Kota Medan. ... *Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Dan ...*, 2(April), 5767.
<http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimsipol/article/view/1657%0Ahttp://jurnalma>
[hasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimsipol/article/download/1657/1675](http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimsipol/article/download/1657/1675)

- Sari, J. A., Ismowati, M., Nur Sukmawati, & Nur Ambia Arma. (2022). Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 10(2), 127–136. <https://doi.org/10.31289/publika.v10i2.7886>
- Sinen, K. (2021). Kinerja Ombudsman di Maluku Utara. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran ...*, 1996. <https://unimuda.e-journal.id/jipunimuda/article/view/1609%0Ahttps://unimuda.e-journal.id/jipunimuda/article/download/1609/842>
- Tantri, Basri, M., & Qomariyah, E. (2024). Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Ombudsman Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara. *Republica Jurnal Administrasi Negara*, 10(3), 88–109. <https://ojs.uho.ac.id/index.php/rezpublica>
- Yusri, A. Z. dan D. (2020). Analisis Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Dalam Menangani Laporan Maladministrasi Pelayanan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), 809–820.